

**SEJARAH PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA INDONESIA
(STUDI KASUS: PENAJAJAHAN JEPANG)**

Mohammad Faeyza Azhari Dhoifullah

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidoarjo

ABSTRACT

The Dutch Colonial Policy continued to influence Indonesia's economy leading up to independence due to the Dutch economic focus on the development of plantation industries such as coffee, tobacco, rubber, palm oil, and sugar. During the Japanese occupation, the socio-economic conditions of Indonesian society underwent significant changes. The socio-economic life of Indonesia was greatly influenced by the Japanese occupation, which began in 1945. During the colonial period, the Japanese government implemented policies to maintain their dominance in Southeast Asia and to increase the production and utilization of Indonesia's natural resources. There are many different perspectives on the socio-economic conditions of Indonesian society during the Japanese occupation. First, the conflict between the ruling group and the non-ruling group causes the social structure of Indonesian society to change. When ordinary people struggle to meet their basic needs, members of the Indonesian elite, including businessmen and government officials, benefit from Japanese policies. Secondly, the Japanese government exploited Indonesian labor and took Indonesia's natural resources. Third, Indonesian culture and customs were destroyed and disrespected by the Japanese government.

Keywords: *Japanese Occupation, Socio-Economics, Islamic Period, Independence.*

ABSTRAK

Kebijakan Kolonial Belanda terus memengaruhi ekonomi Indonesia menjelang kemerdekaan karena fokus ekonomi Belanda pada pengembangan industri perkebunan seperti kopi, tembakau, karet, kelapa sawit, dan tebu. Selama penjajahan Jepang, kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia mengalami perubahan besar. Kehidupan sosial-ekonomi Indonesia sangat terpengaruh oleh penjajahan Jepang, yang dimulai pada tahun 1945. Selama periode penjajahan, pemerintah Jepang mengambil kebijakan untuk mempertahankan dominasi mereka di Asia Tenggara dan meningkatkan

produksi dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Ada banyak perspektif yang berbeda tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat Indonesia selama penjajahan Jepang. Pertama, konflik yang terjadi antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa menyebabkan struktur sosial masyarakat Indonesia berubah. Ketika rakyat biasa menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, anggota elit masyarakat Indonesia, termasuk pengusaha dan pejabat pemerintah, mendapatkan keuntungan dari kebijakan Jepang. Kedua, pemerintah Jepang menggunakan tenaga kerja rakyat Indonesia dan mengambil sumber daya alam Indonesia. Ketiga, budaya dan adat istiadat Indonesia dirusak dan dilecehkan oleh pemerintah Jepang.

Kata Kunci: *Penjajahan Jepang, Sosial Ekonomi, Masa Islam, Kemerdekaan.*

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan menjelang kemerdekaan karena inflasi dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola mata uang asing di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan Belanda. Keadaan kas Negara dan bea cukai nihil, begitu juga pajak (Randy 2010). Kondisi ini merupakan konsekuensi dari pemerintahan yang baru dibentuk dan sejumlah besar ketidakpastian politik yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan, tetapi sektor ekonomi tertinggal dan terkena dampak model eksploitasi kolonial. Selain itu, penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh negara lain menyebabkan banyak kekayaan alam diekspor, yang berdampak negatif pada ekonomi negara.

Inflasi akibat perang dan revolusi terus

meningkat karena pemulihan ekonomi yang lebih lambat dan pengeluaran pemerintah yang meningkat. yang membuat orang kesulitan karena kenaikan harga. Jadi, seperti yang diharapkan banyak orang, kemerdekaan tidak membawa kemakmuran. Setelah pendudukan Jepang dan revolusi, rakyat Indonesia menghadapi banyak masalah sosial dan ekonomi. Ini menyebabkan kekacauan dan kerusakan di mana-mana. Karena inflasi tinggi, pemerintah Indonesia menetapkan tiga mata uang yang berlaku di setiap wilayahnya setelah merdeka. Ini adalah mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Pada bulan Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas baru yang disebut ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Menurut teori moneter, banyaknya uang yang

beredar menyebabkan harga naik. Pemerintah tidak dapat mengendalikan jumlah uang asing yang beredar di Indonesia, terutama uang Jepang dan Belanda, karena keadaan kas negara dan bea cukai tidak stabil. Karena petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki uang Jepang selama masa pendudukan Jepang, para petanilah yang paling menderita akibat inflasi tersebut. Alasan blokade Belanda terhadap Indonesia adalah karena Belanda ingin mencegah masuknya pasukan dan peralatan militer ke Indonesia, selain itu Belanda juga tidak ingin hasil perkebunan milik Belanda dan negara asing lainnya diambil.

Karena blokade yang dilakukan oleh Belanda, terjadi keadaan sosial ekonomi yang buruk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan. Kas mengalami kekosongan dan pengeluaran meningkat, yang diyakini oleh Belanda bahwa Indonesia akan ambruk secara ekonomi.

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaannya. Karena sebelumnya terjadi diskriminasi rasial melalui pembagian kelas sosial. Sebelum kemerdekaan Indonesia, penduduk pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang sebagian besar menjadi budak dari penguasa atau bangsawan. Rusaknya

perkebunan dan pertanian menyebabkan produksi makanan menurun, terutama beras. Akibatnya, kebutuhan penduduk tidak terpenuhi. Karena kurangnya lahan pertanian, para petani yang bergantung pada buruh untuk bertahan hidup mulai terbagi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan makna dibalik fenomena sosial ekonomi masyarakat menjelang kemerdekaan pada saat masa penjajahan Jepang di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menyusun artikel ini adalah penelitian literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan subjek penelitian, seperti abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal, dan buku referensi (Sugiyono, 2010). Untuk menganalisis data, buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan artikel yang mana diperoleh melalui penggunaan pendekatan kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian sistematis yang digunakan untuk menyelidiki atau menyelidiki subjek pada latar alamiah. Pendekatan kualitatif ini di gunakan karena lebih adaptif terhadap berbagai realitas. Metode dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode

penulisan sejarah yang terdapat lima tahapan, yaitu: 1) pemilihan topik yang akan ditulis, 2) pengumpulan berbagai sumber-sumber tertulis (heuristik), 3) verifikasi sumber 3 (kritik ekstren dan kritik intern) sehingga mengetahui mana yang digunakan dan tidak digunakan, 4) interpretasi (analisis dan sistesis) analisis tulisan yang berdasarkan sumber terpilih, dan 5) penulisan karya tulis seperti yang dilakukan saat ini secara sistematis yang sesuai dengan kaidah (Priyadi, 2012:3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 dengan semboyan bahwa Jepang akan membebaskan Asia dari belenggu barat/penjajahan, namun kenyataannya malah sebaliknya, rakyat Indonesia malah mendapatkan penderitaan yang melebihi masa penjajahan Belanda. Dominasi kolonialisme Jepang di Indonesia membuat para penduduk Indonesia dikuasai, ditindas bahkan berujung pada kekerasan. Sadisnya penjajahan Jepang di berbagai negara Asia seperti Korea, Myanmar, Filipina, Indonesia dan daerah jajahan Jepang lainnya membuat bekas jajahannya menggugat Jepang sampai saat ini. Kedatangan dan masa pendudukan Jepang di Indonesia menjadi periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Jepang saat itu memiliki tujuan mewujudkan

Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya yang salah satunya adalah Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941 secara tiba-tiba Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbour, yaitu pangkalan terbesar angkatan laut Amerika di Pasifik. Setelah penyerangan atas Pearl Harbour itu, selanjutnya Jepang dengan cepat melakukan serbuan ke selatan, termasuk ke Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya, Jepang berhasil menguasai Kota Balikpapan (24 Januari 1942), Pontianak (29 Januari 1942), Samarinda (3 Februari 1942), dan Banjarmasin (10 Februari 1942). Pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Setelah berhasil menguasai wilayah luar Jawa, Jepang kemudian memusatkan serangannya ke Pulau Jawa. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan (Jawa Barat) dan Kragen (Jawa Tengah). Serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang demikian besar dan cepat membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942 Gubernur Jenderal A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan beberapa

petinggi militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Barat bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Dalam penyerahan kekuasaan atas Indonesia tersebut, Belanda diwakili oleh Letnan Jendral Ter Poorten dan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura. Sejak saat itu, Indonesia dikuasai oleh Jepang.

SISTEM EKONOMI PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

Salah satu tujuan Jepang menguasai Indonesia adalah untuk mendapatkan bahan baku guna memenuhi kebutuhan perangnya melawan pasukan Sekutu. Pasalnya, pada saat itu Jepang telah mengobarkan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Atas dasar itu, ciri khas sistem ekonomi yang dilakukan Jepang di Indonesia adalah sistem ekonomi yang bertujuan untuk kepentingan perang Jepang. Sistem ekonomi tersebut bernama ekonomi perang. Ekonomi perang adalah kebijakan suatu negara untuk mengerahkan semua kekuatan ekonominya untuk menopang keperluan perang. Tujuan sistem ekonomi perang yang diterapkan Jepang di Indonesia adalah untuk memprioritaskan produksi barang dan jasa yang dapat memperkuat pertahanan Jepang dari serangan Sekutu. Ciri khas sistem

ekonomi yang diterapkan Jepang di Indonesia adalah pemusatan kegiatan ekonomi untuk kepentingan perang. Seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung perlengkapan perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting. Agar tujuannya tercapai, Jepang menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian secara ketat, yang meliputi: Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang.

Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu, sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan produksi tanaman yang tidak menguntungkan perang, seperti teh, kopi, dan tembakau. Pemaksaan menanam padi, pohon jarak, dan kapas. Aturan pengendalian tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang No. 322/1942 yang menyatakan bahwa Gunseikan (kepala militer) ditugaskan untuk mengawasi secara langsung perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Pelanggaran terhadap kebijakan Jepang tersebut akan dihukum dengan sanksi yang berat. Pabrik gula yang banyak dibangun pada masa pendudukan Belanda, dialihfungsikan sebagai pabrik senjata.

Penerapan sistem ekonomi autarki

Pada saat Jepang menerapkan sistem ekonomi perang, diberlakukan pula sistem ekonomi autarki. Autarki adalah sistem

perekonomian swasembada dan perdagangan terbatas yang dilakukan dalam suatu negara. Sistem ini diterapkan dengan tujuan agar setiap daerah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sistem ekonomi perang dan autarki membuat rakyat Indonesia menderita, karena masing-masing daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi segala bentuk kegiatan ekonominya difokuskan untuk kepentingan perang Jepang. Kebijakan Jepang di bidang ekonomi membuat kesejahteraan rakyat menurun, sebaliknya angka kematian terus naik.

Dampak kebijakan Jepang di bidang ekonomi

Kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh Jepang mengakibatkan krisis pangan dan sandang. Pembatasan dan pengendalian produksi tanaman menyebabkan para petani maupun pemilik lahan mengalami kerugian besar. Kebijakan penyerahan padi yang semakin ekstrem juga berimbas pada menurunnya jumlah padi di masyarakat hingga mengakibatkan bencana kelaparan. Selain krisis pangan, kebijakan penanaman tanaman kapas dan rami yang diberlakukan oleh Jepang ternyata tidak luput dari tindak kecurangan. Hal itu berdampak terhadap jumlah produksi kapas dan rami yang semakin menipis, hingga menimbulkan kelangkaan bahan sandang bagi rakyat. Untuk menutupi

tubuhnya, tidak sedikit rakyat Indonesia yang menggunakan karung goni bekas menyimpan beras atau bahan makanan lainnya.

Kemiskinan

Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah membuat masyarakat sangat menderita. Kemiskinan terjadi karena eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap sumber daya alam Indonesia dan juga sumber daya manusia, yaitu melalui romusa. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya di bidang ekonomi. Hal ini juga berdampak pada bidang politik, sosial-budaya, pendidikan, maupun di bidang birokrasi dan militer. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah membuat masyarakat sangat menderita. Kamu perlu memahami dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia sebagai pembelajaran sejarah Indonesia.

1. Eksploitasi Sumberdaya Manusia Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah eksploitasi sumber daya manusia. Hal ini guna membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Awalnya tenaga kerja dikerahkan dari

Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagaisarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda- pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang awalnya sukarela lama - lama menjadi paksaan. Desa - desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romukyokai, yang ada di setiap daerah. Dampak kependudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah eksloitasi dalam bentuk romusa ini. Para pekerja romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan dan makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusa sebagai “pahlawan pekerja” atau “prajurit ekonomi”. Mereka digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja romusa itu juga dikirim ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, dan Malaya.

2. Masyarakat Kesulitan Bahan Makanan dan Barang-Barang Keperluan Selain itu, dampak pendudukan Jepang terhadap

perekonomian di Indonesia adalah masyarakat kesulitan bahan makanan dan barang-barang keperluan. Saat itu kondisi masyarakat menyedihkan. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang jumlahnya semakin meningkat. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota- kota besar. Barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya.

Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat- obatan juga sangat sulit didapatkan. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat oleh Pemerintah Jepang yang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian.

Dampak Keberadaan Jepang terhadap Bidang Sosial

Dampak Positif Penjajahan Jepang terhadap

Kehidupan Sosial Budaya antara lain:

1. Adanya Pendidikan Berjenjang
Pendidikan di suatu negara sudah pasti memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Sebab, dengan sumber daya manusia berpendidikan, akan mendorong budaya yang lebih maju di negara tersebut. Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan atau sekolah dengan dua belas jenjang. Jenjang sekolah ini masih digunakan hingga saat ini, yaitu sekolah dasar enam tahun, sekolah menengah pertama tiga tahun, dan sekolah menengah atas tiga tahun.
2. Adanya Strata Masyarakat. Selain menciptakan sekolah berjenjang, Jepang juga membentuk sistem sosial bernama *Tonarigumi*, untuk mengawasi aktivitas politik Indonesia. *Tonarigumi* adalah kerukunan tetangga yang dibuat oleh tentara Jepang untuk memudahkan mengenal dan mengawasi warga. Setiap *Tonarigumi* membawahi 10-20 kepala rumah tangga, yang diketuai oleh *Kumico* (sekarang disebut RT). Setiap satu bulan sekali, para *Kumico* akan melakukan rapat secara berkala untuk melaporkan hasil pemantauan yang didapatkan. Menurut sejarahnya,

Kekaisaran Jepang sudah berhasil mengumpulkan 508.745 *Tonarigumi* yang terdiri dari 8.967.320 kepala rumah tangga di seluruh Jawa.

3. *Kumiyai* Cikal Bakal Koperasi. Jepang juga membentuk suatu badan yang didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, bernama *Kumiyai*. *Kumiyai* ini merupakan lembaga ekonomi yang berupa koperasi model Jepang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi pribumi. Pada masa penjajahan, Jepang memerintahkan seluruh wiraswasta untuk menerapkan *Kumiyai* agar dapat diawasi melalui koperasi tersebut. Hingga kini, *Kumiyai* telah berkembang menjadi koperasi yang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi, Jepang turut memengaruhi kehidupan sosial budaya dengan mendukung pendidikan dan ekonomi Indonesia.

Dampak Negatif Penjajahan Jepang
terhadap Kehidupan Sosial Budaya

1. Sulitnya Hubungan Antarpulau

Pada masa penjajahan Jepang, hubungan dan interaksi pemerintahan antarpulau sangat dibatasi. Ini terjadi karena Jepang mengendalikan seluruh saluran

komunikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia.

2. Adanya *Seikerei*

Di masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia wajib melakukan *seikerei*, atau cara penghormatan dengan membungkuk 90 derajat setiap pagi kepada Kaisar Jepang Tenno Heika. Tidak hanya membungkuk hormat, rakyat Indonesia juga harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, yaitu *Kimigayo*. Penghormatan ini tentu saja tidak sejalan dengan budaya asli Indonesia, sehingga menimbulkan pertentangan.

3. Munculnya Sistem Romusha

Selain perekonomian yang terpuruk akibat kebijakan ekonomi perang Jepang, pengerahan tenaga kerja melalui romusha juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Romusha dimobilisasi untuk pembangunan sarana perang tidak hanya di Indonesia saja melainkan di Burma, Muangthai (Thailand), Vietnam dan Malaysia. Selain romusha, juga diterapkan jugun ianfu yaitu merekrut para perempuan untuk dijadikan penghibur bagi tentara Jepang.

4. Pendidikan

Selama pendudukan Jepang, kondisi pendidikan menurun drastis bila dibandingkan masa Hindia Belanda.

Kegiatan perguruan tinggi juga sempat terhenti beberapa saat. Baru pada tahun 1943 pendidikan perguruan tinggi mulai dibuka kembali. Para pelajar diberikan slogan *Hakko Ichiu*, yang berarti Delapan Penjuru Dunia Di Bawah Satu Atap. Satu atap yang dimaksud adalah di bawah Kekaisaran Jepang. Ajaran *Hakko Ichiu* ditujukan sebagai doktrin dari pihak Jepang.

Penggunaan Bahasa dan Stratifikasi Sosial Meskipun kebijakan Jepang banyak yang negatif, terdapat beberapa kebijakan positif yang dapat dirasakan bangsa Indonesia, salah satu diantaranya adalah diharuskannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selama masa penjajahan Jepang, Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, terbentuk sistem stratifikasi baru dari masa Hindia Belanda dimana pribumi menjadi golongan diatas bangsa Eropa dan Timur Asing.

KESIMPULAN

Penjajahan Jepang di Indonesia meninggalkan warisan yang kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, penjajahan Jepang membawa dampak negatif seperti kemiskinan, kemelaratan, dan trauma. Di sisi lain, penjajahan Jepang juga

membangkitkan semangat nasionalisme dan kebangsaan yang mendorong rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dengan demikian Jepang banyak memberikan pengalaman berharga dalam memimpin suatu negara dan bagaimana melestarikan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman. (2014). Indonesia: Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Yogyakarta: Pujangga Press.
- Badrika, I. W. (1997). Sejarah Nasional Indonesia dan Umum. Ed. 2, Cet. 2. Jakarta: Erlangga.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang.
- Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 13(2), 189-205. 65 | JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP UNJA Fattah, A. (2005). Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer 1945- 2004. Yogyakarta: LKiS.
- Gottschalk, L. (1986). Mengerti Sejarah. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hudaidah, H., & Karwana, M. A. P. (2022). Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang.
- Danadyaksa Historica, 1(2), 97-104. Husaini, F dan Apid. (2008). Romusa: Sejarah yang terlupakan. Yogyakarta: Ombak.
- Istifaroh, A. (2014). Kebijakan Pendudukan Pemerintahan Jepang Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Surabaya Tahun 1942-1945.
- Koentjaraningrat. (1983). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
- Kurasawa, A. (2015). Kuasa Jepang di Jawa (Perubahan Sosial di Perdesaan 1942- 1945). Diterjemahkan oleh Hermawan Sulisty. Depok: Komunitas Bambu.
- Kutoyo, S. (1997). Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Praditya, D. W., & Sunarti, L. (2022). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Militer Jepang terhadap Kehidupan Sosial-Militer di Kedu-Syuu Tahun 1942-1945. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(4), 4068-4077.